

DAFTAR PUSTAKA

- Abidasari, S. (1975). Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Asing : Tinjauan *Legalitas Marriage Between Indonesian Citizens With Foreign Refugees : Legality Reviews Abstract* Asing Yang Secara Tradisional Ingin Menuju Negara Australia Dan Selandia Baru . 77–96.
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.55210/Assyariah.V8i1.765>
- Ahmad Fahmi Fawaid. (2022). *Status Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia (Wni) Dengan Pengungsi Dari Luar Negeri (Studi Kasus Wni Dengan Pengungsi Afghanistan Di Cisarua, Bogor)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alfiah Sabrina. (2018). Pelindungan Hukum Terhadap Wni Yang Menikah Dengan Pengungsi Yang Berstatus Stateless Person . *Justitia Jurnal Hukum* , 2(2).
- Anggraini, S. A., Putera, R. P., Islam, H. K., Lampung, U. I., & Lampung, U. I. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial. 71–83.
- Ansori, M. H., Efendi, J., & Adiwena, W. (2017). *Beyond Charity: Kebijakan, Praktek, Dan Tantangan Dalam Menangani Krisis Pengungsi Di Asia Tenggara*.
- Arief, W., Deny, S., & Jamaludin. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral Dan Karakter* (1 Ed.). Cv. Aa. Rizky.
- Astia, S. (2024). *Neoclassical Legal Review : Journal Of Peran Unhcr Dalam Memberikan Pelindungan Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Unhcr ' S Role In Providing Protection To Rohingya Refugees In Indonesia During The Covid-19 Pandemic*. 03(02), 98–106.
- Budiman, E. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatat Berdasarkan Uu.No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. 16, 1–23.
- Cantonia, S., Ilyas, D., & Majid, A. (2021). Dan Hak Asasi Manusia (*Juridical Review On Interfaith Marriage In Indonesia In The Perspective Of Marriage Law And Human Rights*). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dengan Model Sekolah Ramah Ham (Sr-Ham). *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277>
- Dharma, S. (2021). *Membangun Kesadaran Global Warga Negara: Studi Kebijakan*

ory-Of-

- Lubis, R. E. L. (2024). Salahkah Saya Mencintai Suami Saya? Dia Juga Manusia' – Pahit Getir Kehidupan Perempuan Indonesia Yang Menikah Dengan Pengungsi Rohingya. Bbc News Indonesia. [Ttps://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cy00j9dk88vo](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo)
- Mafaid, A., & Tanjung, D. (2024). Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat. Kabilah: *Journal Of Social Community*, 9(1), 21–32.
- Majda, E. M., & Siregar, M. F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (*Human Rights Literacy In The Curriculum Of Citizenship Education In Indonesia Higher Education*) Majda El Muhtaj ; M . Fahmi Siregar ; Reh Bungana Beru Pa ; Fazli. *Ham*, 11(3), 369–386.
- Maya, M. F. (2024). Diplomasi Parlemen Memulihkan Myanmar, Menjaga Asean Pengarah (S. Shahab (Ed.); 1 Ed.). Sekretariat Jenderal Dpr Ri.
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif (Suraya (Ed.); 1 Ed.). Kencana.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (Fatia Hijriyanti (Ed.); 1 Ed.). Mataram University Press.
- Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Aziz Hadju, Z. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 26–48. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol30.Iss1.Art2>
- Nadia, L. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Legalitas Anak Di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang. 1(4), 104–115. <https://doi.org/10.62383/Referendum.V1i4.285>
- Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 143–163. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V3i2.57>
- Naswar, Maskun, Abdul Rahman, Muhammad Mutawalli Mukhlis, & Tia Ludiana. (2024). Status Anak Dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara Dan Implikasi Hukum Pelindungan Hak Anak. *Litigasi*, 25(2), 101–129. <https://doi.org/10.23969/Litigasi.V25i2.17914>
- Pinem, V., & Wahyudi, A. (2023). Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak (Studi Di Dp3a Kota Semarang). *Jurnal Transparansi Hukum*, 06(02), 70–86.
- Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. In Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (Pphp) (Nomor 978-602-73574-4-0).
- Purwito, E. (2023). Konsep Pelindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab

- Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/Dekrit.V13n1.152>
- Putra, D., Zamroni, M., & Qoilun, N. (2023). Status Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dalam Rangka Mencari Pekerjaan Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 5(2), 9–14. <https://doi.org/10.51804/Irhces.V5i2.2070>
- Putri, E. A. (2023). Rekonstruksi Pelindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran (Studi Tentang Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya <http://Repository.Uph.Edu/Id/Eprint/62822>
- Rachmah, R. A. (2016). Hidup Yang Terbaikan; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia. Lbh Jakarta.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V3i5.1052>
- Rahayu, R., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Pelindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 202–212. <https://doi.org/10.14710/Mmh.49.2.2020.202-212>
- Ramadhan, T., & Sihalo, O. A. (2023). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (*Constitutional Rights*). *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 13(2), 1–20. <https://doi.org/10.37035/Alqisthas.V13i2.7100>
- Rika Saraswati. (2015). Hukum Pelindungan Anak Di Indonesia (2 Ed.). Pt. Dr. Adisti Maritadinata, A.S.T., M.Si Aditya Bakti.
- Riyanti, D. A., Aulia, B., Saputri, A., & Anggraeni, S. T. (2025). Analisis Hukum Perdata Internasional Dalam Pernikahan Wni. 2(1).
- Rizky Rinaldy Inkiriwang. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lex Privatum*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Salim, E. F., Padjadjaran, U., Judiasih, S. D., Padjadjaran, U., Yuanitasari, D., & Padjadjaran, U. (2021). Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender. *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1–19.
- Shalihah, F., & Nur, M. H. M. (2021). Penanganan Pengungsi Di Indonesia (Budi Asyhari (Ed.); 1 Ed.). Uad Press.
- Shehza Dnoorani. (2018). Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak. Unicef.Org. <https://www.unicef.org/indonesia/Id/Konvensi-Hak-Anak-Versi-Anak-Anak>

- Sholikhawati, Ajeng, Et Al. (2023). Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Dan Hak Asuh Anak Dibawah Umur. *Hakim*, 2(1), 59-72.
- Simamora, A. P., & Nababan, R. (2021). Landasan Dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan Kpk : Suatu Kajian Doktrinal (*The Legal Basis And Impact Of The Kpk ' S National Insight Test : A Doctrinal Study*). Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(September 2020), 201–208. <https://doi.org/10.31289/Strukturasi.V3i2.740>
- Simanullang, T. L., Barus, D. A. H., Anzalia, B. A., Sidabutar, E. D., Purba, F. L., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Pelindungan Hukum Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Dalam Harta Gono Gini Menurut Hukum Perdata. *Hemat: Journal Of Humanities Education Management Accounting And Transportation*, 1(2), 564–570. <https://doi.org/10.57235/Hemat.V1i2.2739>
- Sinaga, E. S., & Beru Perangin-Angin, R. B. (2023). Pelindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya. *I3*(1), 20–31.
- Situmorang, A., & El Muhtaj, M. (2024). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pelindungan Anak Dari Kekerasan Di Sdn 060856 Kecamatan Medan Perjuangan Amelia. *Journal P4i*, 4(4), 257–265.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (1 Ed.). Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Yustiyani Suryandari Sofia (Ed.); 3 Ed.). Alfabeta, Cv.
- Sultoni. (2013). *The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 And Legal Protection For Refugees In Indonesia*. Law Faculty Of Brawijaya University, 6, 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/34781-id-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf>
- Sultoni, Y., Widagdo, S., Hum, M., & Suryokumoro, H. (2014). Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Pelindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia. *Brawijaya Law Student Journal*, 6, 1–14. www.iom.org
- Tambunan, A. W. (2019). Kerja Sama Unhcr Dan Iom Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia. *Journal Of International Relations*, 5(2), 341–350. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiwebsite>; <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Thenia, D. O., Nugroho, A., & Puspoayu, E. S. (2019). Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi Yang Terjadi Di Italia. *Novum : Jurnal Hukum*, 6(1), 1–15.
- Tim Hukumonline. (2022, September 30). Teori-Teori Pelindungan Hukum Menurut Para Ahli. [Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com). <https://www.hukumonline.com>

- erita/A/Teori-Pelindungan -Hukum-Menurut-Para-Ahli-Lt63366cd94dcbc/
- Tutia, I. (2019). Pidana Pengungsi. *Jurnal Kajian Hukum*, 21(1), 145–158.
- Unhcr. (N.D.). Penentuan Status Pengungsi. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/Id/Penentuan-Status-Pengungsi>
- Unhcr Indonesia. (N.D.). Pengungsi. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/Id/Pengungsi>
- Utami, M. T. (2020). *The Implementation Of Non-Refoulement Principle In Case Of Rohingya. The Digest: Journal Of Jurisprudence And Legisprudence*, 1(2), 197–222. <https://doi.org/10.15294/Digest.V1i2.48629>
- Wahyudi, A., Fibriasari, H., & Syahputra., A. (2024). Indonesia Sebagai Upaya Melindungi Diri Sendiri Dalam Konflik. 4(3), 568–576. <https://doi.org/10.53363/Bw.V4i3.275>
- Widanarti, H. (2020). Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan. *Law, Development And Justice Review*, 3(2), 179–190. <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V3i2.9522>
- Wulandari, F., & Melianti, Y. (2016). Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Sumatera Utara Dalam Memberikan Pelindungan Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum. *Civic Edu Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).

DAFTAR UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2. Undang-Undang Kewarganegaraan, Nomor 12 Tahun 2006
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,
5. UUP Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

8. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut DUHAM),
9. Konvensi Tahun 1951 Tentang Pengungsi dan Konvensi Hak Hak Anak.



THE
Character Building
UNIVERSITY